

2ND ICAF UMY 2016

International Conference
on Accounting and Finance



Proceeding

"Behavioral Accounting Issues in South East Asia"

Accounting Department
Faculty of Economics
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



**PROCEEDING
2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ACCOUNTING AND FINANCE
(2nd ICAF UMY 2016)**

“Behavioral Accounting Issues in South East Asia”



**ACCOUNTING DEPARTMENT
FACULTY OF ECONOMICS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2016**

ICAF UMY 2016

PROCEEDING
2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ACCOUNTING AND FINANCE (2nd ICAF UMY 2016)

“Behavioral Accounting Issues in South East Asia”

Copyright 2016, Accounting Department UMY

Published by
Accounting Department UMY
Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Bantul, Yogyakarta
Tlp. 0274-387656

ISBN 978-602-72325-1-8

Editor

Dr. Bambang Jatmiko, S.E., M.Si
Evi Rahmawati, Ph.D., M.Acc., Ak., CA
Dr. Harjanti Widiastuti, M.Si., Ak
Dr. Ietje Nazaruddin, M.Si., Ak., CA
Dr. Ihyaul Ulum, M.Si., Ak., CA
Dr. M. Akhyar Adnan, MBA., Ak., CA
Dr. Muhammad Nur A. Birton, M.Si., Ak
Rina Trisnawati, Ph.D., M.Si., Ak., CA
Rizal Yaya, Ph.D., M.Sc., Ak., CA
Dr. Sigit Hermawan, M.Si
Dr. Suryo Pratolo, M.Si., Ak., CA., AAP
Dr. (Cand) Ahim Abdurahim, M.Si., Ak., CA., SAS
Dyah Ekaari Sekar J, S.E., M.Sc., Ak., CA., QIA
Emile Satia Darma, S.E., M.Si., Ak., CA
Evy Rahman Utami, S.E., M.Sc
Hafiez Sofyani, S.E., M.Sc
Ilham Maulana Saud, S.E., M.Sc., Ak
Peni Nugraheni, S.E., M.Sc., Ak., CA
Sigit Arie Wibowo, S.E., M.Acc., Ak., CA

2ND

ICAF UMY 2016

TABLE OF CONTENT

PREFACE	i
TABLE OF CONTENT	ii
RUNDOWN 2nd ICAF UMY 2016	ix
SCHEDULE CONCURRENT (PARALLEL) SESSION	xi

MANAGEMENT ACCOUNTING

Dampak Partisipasi Anggaran dan <i>Reinforcement Contingency</i> terhadap Komitmen Organisasi <i>Mia Selvina; Yuliansyah; Pigo Nauli</i>	1
Budaya dan Religiuisitas dalam Mencegah Korupsi di Indonesia <i>Junaidi dan Rismawati</i>	2
Fobi(A)Kuntansi: Puisisasi dan Refleksi Hakikat <i>Ari Kamayanti</i>	3
Peranan Etika Profesi dalam Akuntansi Keperilakuan <i>Mispiyanti</i>	4
Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen dan Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Staff ATC dengan <i>Locus Of Control</i> sebagai Variabel Pemoderasi <i>Fathul Huda Anjumi dan Rizal Yaya</i>	5
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa <i>Nashirotn Nisa Nurharjanti</i>	6
Pemetaan Sektor Strategis Domestik Akselerasi Pembangunan Industri Nasional <i>Amrizal dan Agus Munandar</i>	7

<i>The Influence of Organizational Commitment Toward the Implementation of the System Accounting Information at Regencies and Cities in North Sumatra, Indonesia</i> <i>Eka Nurmala Sari dan Fitriani Saragih</i>	8
Peran Keadilan, Sistem Informasi Akuntansi Manajemen, dan Komitmen pada Tujuan Anggaran dalam Proses Penyusunan Anggaran <i>Mirna Indriani</i>	9
AUDIT	
Kontruksi Tanggung Jawab Auditor Perspektif Mamayu Hayuning Bawono <i>Novrida Qudsi Lutfillah; Yenni Mangoting; Riesanti Edie Wijaya</i>	10
Pengaruh <i>Tenure</i> , Rotasi Audit, dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit <i>Aldilla Agustira Eka Saputri; Achmad Syaiful Hidayat A; Gina Harventy</i>	11
Pengaruh Audit <i>Tenure</i> , Rotasi Audit dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit <i>Rahmita Dwinesia Papatungan; Ahamd Juanda; Eris Tri Kurnia W</i>	12
Peran Auditor Internal dan Pengendalian Intern dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik <i>Widia Astuty</i>	13
Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , Auditor Spesialis, dan Komite Audit terhadap Asimetri Informasi <i>Easty Safitry Tinumbia; Sri Wahjuni Latifah; Adi Prasetyo</i>	14
Kualitas Audit: Sebuah Meta Analisis <i>Rifzita Vinda Arianiestasya Putri; Ihyaul Ulum; Achmad Syaiful Hidayat A</i> ...	15
Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik <i>Miftahurrohmat Amalia dan Wahyu Manuhara Putra</i>	16

PERAN AUDITOR INTERNAL DAN PENGENDALIAN INTERN DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Widia Astuty

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 Medan

e-mail : widiamaksi@gmail.com

Abstract

This study aimed at obtain the interpretation of: (1) The effect of the role of the internal auditor on the good governance implementation; (2) Effect of internal control on the good governance implementation; and (3) Effect of the role of internal auditors and internal control simultaneously on the good governance implementation.

This research method using descriptive and verificative types. The unit of analysis in this study are all the Provincial Office of North Sumatra. Descriptive analyzes were performed to obtain a picture of the role of internal auditors and internal control and the implementation of good governance. While verificative analyzes to examine the effect of the role of internal auditors and internal control partially and simultaneously on the good governance implementation with Path analysis.

The results showed that: (1) There is the influence of the role of the internal auditor on the good governance implementation; (2) There is an effect of the internal control on the good governance implementation ; and (3) There is the influence of the role of internal auditors and internal control simultaneously on the good governance implementation.

Keywords: Internl Auditor, Internal Control, Good Governance

1. PENDAHULUAN

Otonomi Daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya berdasarkan aspirasi masyarakat, dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya banyak daerah yang dimekarkan atau memisahkan diri dari provinsi atau kabupaten yang semula mereka bergabung. Dimulai dari 4 (empat) daerah, yaitu Banten, Bangka-Belitung, Maluku Utara dan Gorontalo yang dimekarkan dari provinsi asalnya serta beberapa daerah yang menjadi Kabupaten dan Kota termasuk di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Batubara, pemekaran dari Kabupaten Asahan pada tanggal 2 Januari 2007; Kabupaten Padang Lawas, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 17 Juli 2007; Kabupaten Padang Lawas Utara, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 17 Juli 2007; Kabupaten Labuhanbatu Utara, pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 24 Juni 2008; Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 24 Juni 2008; Kota Gunung Sitoli, pemekaran dari Kabupaten Nias pada tanggal 29 Oktober 2008; Kabupaten Nias Barat, pemekaran dari Kabupaten Nias pada tanggal 29 Oktober 2008; Kabupaten Nias Utara, pemekaran dari Kabupaten Nias pada tanggal 29 Oktober 2008. Akibat adanya pemekaran tersebut

pemerintah daerah yang bersangkutan harus mampu menghidupi dirinya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan asli daerahnya untuk menutup segala pengeluaran biaya rutin dan pembangunannya, walaupun mungkin pemerintah pusat tetap masih memberi bantuan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) atau lainnya (Harian Orbit Sumut, 31 Mei 2010).

Provinsi Sumatera Utara yang dilengkapi dengan 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk 20 dinas yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pemerintahan. Berdasarkan luasnya Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang memiliki potensi besar dalam Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meningkat setiap tahunnya sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan, APBD dari masing-masing pemerintah daerah jumlahnya tidak sama, sehingga dapat melaksanakan pembangunan dengan baik

Namun pada kenyataannya penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, masih jauh dari harapan. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya pengaduan masyarakat, terbongkarnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan pihak eksekutif dan pihak legislatif yang sedang dan sudah diproses penyidik, bahkan ada yang sudah disidangkan dan dijatuhi hukuman. Seperti Gubernur Sumatera Utara tersangka dugaan korupsi APBD Langkat 2002-2007 Rp 102M, Walikota Tanjungbalai tersangka dugaan korupsi MTQN ke 31 Sumut tahun 2008 senilai Rp 5,6 Miliar, Selanjutnya dugaan korupsi di Pemko Medan, diantaranya, dugaan korupsi pengorekan parit yang melibatkan 11 camat, kasus pengadaan dan rehabilitasi jalan pada Perubahan APBD 2009 di Dinas Bina Marga Medan. Selanjutnya Dinas PU (Pekerjaan Umum) Bina Marga dengan kasus perbaikan drainase pada tahun 2007 senilai Rp 2,8 M. Mantan Kasubbag Pengawasan Dinas PU vonis 2,8 tahun penjara. Mantan Kadis Pertanian Binjai dan bendaharanya dengan tuntutan penjara 54 bulan. Dinas kebersihan dan pertamanan dengan kasus proyek fiktif tahun 2007 senilai Rp 700 juta mantan Kadis menjadi tersangka (Harian Orbit Sumut, 31 Mei 2010).

Selanjutnya dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Tanjungbalai dengan kasus dugaan *mark-up* pengadaan alat kesehatan tahun 2009 senilai Rp 3,3 M dengan asal dana dari DAK. Tumpak tindih penggunaan dana bantuan PNPM Mandiri yang dikelola Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tanjungbalai. Dana Anggaran 2006-2007 senilai Rp 20 M itu diduga menjadi ajang korupsi BKM. Seterusnya dugaan korupsi dana bantuan korban Tsunami tahun 2006 silam yang diduga melibatkan Bupati Nias dengan dugaan korupsi senilai Rp 354 juta di bagian Keuangan Sekda Kabupaten Nias. Pj Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, tersangka kasus korupsi dana pembinaan dan keamanan tahun 2004 senilai Rp 2,3 M, dugaan penggelapan APBD tahun 2005 senilai Rp 3 M yang diduga dilakukan Bupati Tobasa. Kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan pra-sarana air tahun 2007 senilai Rp 1,86 M yang diduga dilakukan oleh oknum di Distarukim Tobasa (Harian Orbit Sumut, 31 Mei 2010).

Fenomena ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan pengendalian yang merupakan salah satu elemen pokok dari fungsi manajemen yang tidak lagi dapat dilaksanakan secara efektif bila tetap mempertahankan tumpuan secara langsung hanya pada pimpinan puncak saja. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah, khususnya kepada pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya, termasuk dinas-dinas yang berada di lingkungannya, yaitu keharusan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu ; transparansi, partisipasi dan akuntabilitas (LAN dan BPKP : 2000). Berdasarkan hal tersebut, untuk mewujudkan *good governance*, diperlukan

manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik dan handal, yakni manajemen yang kondusif, responsif dan adaptif, sehingga dapat menciptakan sistem administrasi publik dengan pendekatan pelayanan publik yang relevan bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan reformasi pemerintahan yang sedang berjalan di Indonesia, perubahan paradigma memiliki relevansi yang signifikan, khususnya dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Agar pemerintahan yang baik dapat direalisasikan, maka dibutuhkan komitmen dari semua pihak, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan mengadakan kemitraan yang baik, integritas, profesionalisme dan etos kerja serta moral yang tinggi. Untuk menunjang penerapan *good governance* selain diperlukan pengendalian intern, juga diperlukan peran auditor internal pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda).

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, peran Bawasda selaku auditor internal belum optimal dan adanya kelemahan dalam pengendalian intern berdampak pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh peran auditor internal dan pengendalian intern secara parsial dan simultan terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Sumatera Utara? Adapun tujuan penelitian ini adalah membuktikan secara empiris pengaruh peran auditor internal dan pengendalian intern secara parsial dan simultan terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Sumatera Utara.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Auditor Internal

Dinas merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang berada di bawah Pemerintah Daerah, setiap akhir masa anggaran diwajibkan untuk membuat pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan barang dalam bentuk : Laporan realisasi anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan kepada Kepala Daerah, sesuai pasal 265 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Didalam tubuh pemerintah daerah terdapat aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah yang membantu pimpinan pemerintah dalam melakukan pengawasan apakah kegiatan yang dilakukan oleh aparat sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang telah ditentukan. Pengawasan fungsional dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah (PP No.20 Tahun 2001). Dengan demikian pengawasan fungsional mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemerintahan daerah dan pemerintahan desa/kelurahan yang meliputi bidang-bidang pemerintahan, pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaaan aparatur, pendapatan daerah, BUMD, kekayaan negara dan daerah dan lain – lain yang ditugaskan oleh Dinas.
- b. Melaksanakan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau instansi di lingkungan pemerintah daerah atas Petunjuk Dinas.

- c. Melaksanakan pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan, pembinaan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, kekayaan negara/ daerah.
- d. Melaksanakan penilai teknis administratif dan fungsional.

Untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporannya bahwa pertanggungjawaban telah disusun dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibutuhkan peran Bawasda sebagai lembaga independen dan obyektif untuk melakukan evaluasi atas Laporan tersebut. Keberadaan Bawasda sebagai internal auditor ditiap Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) diatur dalam Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan dan Undang-Undang No. 15 tahun 2007 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas melakukan Audit Keuangan, Audit Operasional dan Audit Kinerja. Bawasda sebagai pemeriksa intern memiliki fungsi yang independen dan obyektif, serta dapat memberikan *assurance* dan konsultasi (*consulting*) kepada pimpinan Pemerintah Daerah. Keberadaannya diharapkan dapat memberikan nilai tambah (*value added*) dan memperbaiki operasional Pemerintah Daerah. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa Auditor Internal, membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan interdisiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki keefektifan manajemen risiko, pengendalian, dan proses tatakelola (*governance*) organisasi yang baik (Sawyer et. al : 2003). Untuk selanjutnya keberadaan Bawasda pada Pemerintah daerah diatur berdasarkan masing-masing Peraturan daerah (Perda) pada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sesuai dengan otonomi daerah, Pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) berhak menentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan/Dinas di lingkungannya masing-masing. Hal ini mengakibatkan organisasi Bawasda untuk masing-masing daerah tidak sama/seragam seperti halnya bernama Itwilda.

Agar hasil audit memberikan dampak sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka aparat pengawasan fungsional daerah selaku auditor yang melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan kinerja operasional pemerintah daerah, harus memiliki profesionalitas yaitu persyaratan kemampuan / keahlian, independensi, dan penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama. Diduga dengan aparat pengawasan fungsional daerah yang memiliki profesionalitas yang dicirikan oleh persyaratan kemampuan/ keahlian, independensi, dan penggunaan kemahiran profesional dapat melaksanakan audit pemerintah dengan memadai, sehingga mempunyai implikasi kepada kualitas akuntabilitas keuangan instansi pemerintah daerah.

2.2. Pengendalian Intern

Pengendalian intern yang digunakan dalam sebuah entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut (M. Baihaqi, 2004). Oleh karena itu sebelum auditor melakukan audit secara mendalam atas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan harus memahami terlebih dahulu pengendalian intern.

Konrath (2002:205), mengutip AICPA Profesional Standards, mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut :

“The process effected by an entity’s board of directors, management, and other personel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories :

- 1. Operations Controls – relating to the effective and efficiency use of the entity’s resources;*
- 2. Financial reporting controls – relating to the preparation of reliable published financial statement ; and*
- 3. Compliance control – relating to the entity’s compliance with applicable laws and regulations”.*

Menurut COSO *study*, pengendalian intern adalah suatu proses yang ada pada aktivitas operasi organisasi dan merupakan bagian integral dari proses manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Pengendalian intern merupakan bagian integral dari proses manajemen, karena konsep dasar dari pengendalian intern meliputi : (1) suatu kegiatan (*a process*) ; (2) dilaksanakan oleh manusia (*is effected by people*); (3) diharapkan dapat mencapai tujuan (*objectives*).

Pengendalian intern terdiri atas lima komponen yang meliputi : (1) *Control environment*, (2) *Risk Assessment* ; (3) *Control activities* ; (4) *Information and communication* ; (5) *Monitoring* ; (COSO, 1994 ; Konrath, 2002 ; Whittington, 2001: 242).

Sejalan dengan pendapat COSO, menurut SPAP (IAI, 2001 : 319.2) pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling terkait berikut ini :

1. Lingkungan Pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.
2. Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
3. Aktivitas Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
4. Informasi dan Komunikasi adalah mengidentifikasi, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.
5. Pemantauan adalah proses menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan penerapan sistem pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sistem pengendalian intern tersebut harus memuat prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah (PP No.8 tahun 2006). Kewajiban tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern di masing-masing entitas pelaporan dan akuntansi tersebut semakin dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 yang secara eksplisit mengatur apa yang dinamakan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang secara konsep

banyak mengacu kepada definisi pengendalian intern menurut *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO).

2.3. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan *good governance*. *Good governance*, adalah wujud penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat. (LAN, 2000). Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000, merumuskan arti *good governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Good governance merupakan *issue* yang paling menonjol dalam pengelolaan administrasi publik saat ini (Mulia P. Nasution, 2004). Empat belas karakteristik yang dapat terhimpun dari telusuran wacana *good governance*, yaitu (Tim Pengembangan *Good Public Governance*, Bapenas, 2000) :

1. Berwawasan kedepan (visi strategis)
2. Terbuka (transparan)
3. Cepat tanggap (responsif)
4. Bertanggung jawab/ bertanggung gugat (akuntabel)
5. Profesional dan kompeten
6. Efisiensi dan efektif
7. Desentralistis
8. Demokratis
9. Mendorong partisipasi masyarakat
10. Menjunjung supremasi hukum
11. Mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat
12. Berkomitmen pada pengurangan kesenjangan
13. Berkomitmen pada tuntutan pasar
14. Berkomitmen pada lingkungan hidup (Tim Pengembangan *Good Public Governance*, Bapenas 2000)

Dalam Konfrensi Nasional Kepemerintahan Daerah, pada bulan Oktober 2001 telah disepakati sepuluh prinsip Kepemerintahan Daerah oleh seluruh anggota Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia (ADKASI) dan Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia (ADEKSI), menetapkan prinsip-prinsip pemerintahan, sebagai berikut :

1. Prinsip Partisipasi
2. Prinsip Penegakan Hukum
3. Prinsip Transparansi
4. Prinsip Kesetaraan
5. Prinsip Daya tanggap
6. Prinsip Wawasan kedepan
7. Prinsip Akuntabilitas

8. Prinsip Pengawasan
9. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas
10. Prinsip Profesionalisme

Prinsip-prinsip *good governance* dalam praktek penyelenggaraan negara dituangkan dalam 7 (tujuh) asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam UU No 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Asas-asas tersebut meliputi :

1. Asas Kepastian hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
3. Asas Keterbukaan
4. Asas Proporsionalitas
5. Asas Profesionalitas
6. Asas Akuntabilitas

Keseluruhan prinsip *good governance* tersebut saling memperkuat, terkait, dan tidak dapat berdiri sendiri, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) unsur/prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik, yaitu : *Akuntabilitas*, adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. *Transparansi*, Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap masyarakatnya, baik tingkat pusat maupun daerah. *Keterbukaan*, menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan. *Aturan hukum*, adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

2.4. Hubungan antara Peran Auditor Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Penelitian yang dilakukan untuk melihat hubungan auditor internal dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Di antaranya dilakukan oleh Jenny Goodwin-Stewart, Pamela Kent (2006), menunjukkan terdapat dukungan yang kecil antara audit internal dengan *corporate governance*. E.Ristandi Suhardjadinata, (2006), menemukan peran jasa pemeriksa internal berpengaruh terhadap penerapan tata kelola pemerintah. Kemudian Efrizal Syofyan (2006), menemukan peran auditor internal berpengaruh kecil langsung terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Selanjutnya Zeleke Belay (2007) menemukan peran Internal Audit sangat besar dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan sistem *good governance* dalam organisasi terutama dalam aspek pengelolaan keuangan ,sehingga terjadi peningkatan perhatian terhadap manajemen keuangan dan penilaian terhadap kinerja sektor Pemerintah Ethiopia berdasarkan struktur pemerintahan, mobilisasi sumber daya dan kompetensi sumber. Begitu pula dengan Gusnardi (2008), menemukan pengaruh internal audit secara positif dan lemah terhadap *good corporate governance*. Sedangkan Faufeni Taufik (2010) menemukan auditor internal berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan.

Pemeriksaan intern pada pemerintah daerah, bertugas membantu pimpinan puncak pemerintah daerah dibidang pengawasan antara lain menilai seberapa jauh berfungsinya pengendalian intern pemerintahan, selain memberikan rekomendasi saran-saran perbaikan serta informasi yang berkaitan dengan aktivitas pemerintah daerah yang

bersangkutan dalam upaya pencegahan penyelewengan (*fraud*) (Whittington, 2001; IIA, 1995, Wahyudi Prakasa, 1993, T.M Tuanakotta, 2007).

Keberadaan Bawasda sebagai internal auditor ditiap Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) diatur dalam Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan dan Undang-Undang No. 15 tahun 2007 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas melakukan Audit Keuangan, Audit Operasional dan Audit Kinerja. Bawasda sebagai pemeriksa intern memiliki fungsi yang independen dan obyektif, serta dapat memberikan *assurance* dan konsultasi (*consulting*) kepada pimpinan Pemerintah Daerah. Keberadaannya diharapkan dapat memberikan nilai tambah (*value added*) dan memperbaiki operasional Pemerintah Daerah. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa Auditor Internal, membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan interdisiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki keefektifan manajemen risiko, pengendalian, dan proses tatakelola (*governance*) organisasi yang baik (Sawyer et. al : 2003). Dengan demikian, hipotesis untuk menguji hubungan antara peran auditor internal dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

H1. Ada pengaruh peran auditor internal terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik

2.5. Hubungan antara Pengendalian Intern dan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Penelitian yang dilakukan untuk melihat hubungan auditor internal dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Di antaranya dilakukan oleh Hiro Tugiman (2000) yang merekomendasikan pimpinan perusahaan hendaknya menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian intern dalam perusahaan penting dan harus dilaksanakan secara konsekuen agar kinerja perusahaan dapat tercapai. Sedangkan Pratolo (2007) menemukan pengendalian internal berpengaruh terhadap *good governance*, Selanjutnya Gusnardi (2008), menemukan internal control berpengaruh secara positif terhadap *good corporate governance*. Lebih lanjut Selanjutnya Diana Sari (2012) menemukan pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengendalian intern akan menghasilkan laporan yang dikehendaki manajemen di atas, dalam arti yang tegas, sistem tersebut akan : (a). mengamankan sumber-sumber dari pemborosan, kecurangan dan ketidak-efisienan. (b). meningkatkan ketelitian dan dapat percayainya data akuntansi. (c). mendorong ditaatinya dan dilaksanakannya kebijakan organisasi. (d). meningkatkan efesiensi dan (e). perlunya suatu unit pengawasan intern.(Bodnar ; 2000). Dengan demikian, hipotesis untuk menguji hubungan antara pengendalian intern, dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

H2. Ada pengaruh pengendalian intern terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik

2.6. Hubungan antara Peran Auditor Internal, Pengendalian Intern, dan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Era keterbukaan pada saat ini menuntut instansi pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan aktivitasnya secara transparan dan menyampaikan hasil capaian kinerjanya setiap akhir periode yang telah ditentukan

(Baswir :2000). Prinsip-prinsip keterbukaan dalam pengelolaan potensi serta capaian kinerja tercermin dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*the principles of good government governance*). Oleh karena itu pengendalian intern akan menghasilkan laporan yang dikehendaki manajemen. Semakin meningkatnya pengakuan manajemen atas manfaat pengendalian intern yang baik serta semakin rumitnya struktur pengendalian intern yang memadai dalam suatu organisasi telah menyebabkan berkembangnya audit intern sebagai suatu bentuk pengendalian terhadap semua pengendalian lainnya. (Arrens, 2003, Epstein dan Geiger, 1994). Oleh itu untuk menilai pengendalian intern dibutuhkan pemeriksaan intern. Pemeriksaan intern adalah kegiatan penilaian bebas, yang dipersiapkan dalam organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Kegiatan ini meliputi memeriksa dan menilai efektivitas kerja, tanpa fungsi audit intern, manajemen tidak memiliki sumber informasi intern yang bebas mengenai kinerja manajer. Dengan demikian, hipotesis untuk menguji hubungan antara peran auditor internal, pengendalian intern, dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

H3. Ada pengaruh peran auditor internal dan pengendalian intern secara bersama-sama terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *descriptive* dan *verificative*. Penelitian *descriptive* dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang peran auditor internal dan pengendalian intern serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan penelitian *verificative* ditujukan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *survey*. Metode *survey* dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data.

Operasionalisasi Variabel

Secara ringkas operasionalisasi variabel dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Peran Auditor Internal / Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) (Whittington, 2001; Boyton et.al, 2001; Sawyer, 2003) (X₁)	Kompetensi	a. Pendidikan b. Pelatihan c. Komunikasi	Ordinal
	Integritas dan objektif	a. Kualitas kepentingan b. Kualitas kejujuran c. Kualitas netralitas d. Kualitas konsistensi	Ordinal
	Independensi	a. Independen dalam program audit b. Independen dalam verifikasi c. Independen dalam pelaporan	
Pengendalian Intern (COSO,1994;	Lingkungan Pengendalian	a. Nilai Integritas dan moral b. Bertanggungjawab dan mampu c. Struktur Organisasi	Ordinal

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Konrath , 2002) (X₂)		d. Kebijakan Sumber Daya Manusia	
	Penaksiran Risiko	a. Identifikasi risiko b. Analisis risiko	
	Kegiatan Pengendalian	a. Pemisahan fungsi b. Otorisasi transaksi c. Dokumen dan catatan d. Pengendalian fisik	Ordinal
	Informasi dan Komunikasi	a. Arus informasi b. Pengguna informasi	Ordinal
	Pemantauan	a. Konsistensi b. Evaluasi dan pelaporan	Ordinal
Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (UNDP, 1997; LAN dan BPKP, 2004) (Y)	Partisipasi	a. Pengambilan keputusan yang demokratis b. Kebebasan Pers c. Kebebasan Berpendapat d. Keterlibatan Masyarakat	Ordinal
	Transparansi	a. Keterbukaan keuangan b. Keterbukaan Operasional c. Keterbukaan Pengambilan Keputusan	Ordinal
	Akuntabilitas	a. Pemberian Informasi Keuangan kepada Masyarakat dan Pemakai lainnya b. Menilai Pertanggungjawaban c. Pelaporan	Ordinal
	Daya Tanggap	a. Pelayanan kepada msyarakat b. Tanggap terhadap setiap masukan c. Memberikan solusi atas permasalahan d. Penyelesaian masalah dengan cepat dan tepat	Ordinal
	Berorientasi pada konsensus	a. Komitmen terhadap visi b. Komitmen terhadap misi dan tujuan	Ordinal
	Berkeadilan	a. Setiap warga memiliki hak dalam kesejahteraan b. Memiliki program kesejahteraan masyarakat c. Peningkatan sarana dan prasarana bagi masyarakat	Ordinal
	Efektivitas dan Efisien	a. Program berorientasi hasil b. Program berorientasi biaya	Ordinal
	Kepastian Hukum	a. Setiap anggota masyarakat berkedudukan sama dihadapan hukum b. Setiap anggota masyarakat memperoleh hak sama dalam kesejahteraan	Ordinal
	Visi Strategik	a. Setiap pimpinan memiliki perspektif masa depan yang baik b. Setiap pimpinan memiliki program kerja jangka panjang	Ordinal

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pejabat/ aparat dinas Provinsi Sumatera Utara berjumlah 945. Dari populasi penelitian tersebut akan ditentukan responden penelitian sedangkan untuk menentukan ukuran sampel minimum menggunakan rumus Slovin (Husein Umar, 2002 :141) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2},$$

$$n = \frac{945}{1 + 945(0,05)^2}$$

$$n = 281$$

di mana :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel, yang dapat ditolerir.

Dengan menggunakan rumus di atas, maka ukuran responden minimal yang diperoleh sebanyak 281 orang responden dari 945 orang pejabat pada dinas- dinas Provinsi Sumatera Utara dengan harapan ukuran responden tersebut dapat memberikan gambaran terhadap populasi penelitian. Selanjutnya Penentuan ukuran sampel untuk masing-masing dinas tersebut menggunakan ukuran proporsional dengan strata populasi (*proportional to size*), dengan rumus (Nazir, 1999: 165) sebagai berikut :

$$n_i = \frac{N_i}{N} xn$$

Keterangan :

N_i = besarnya populasi pada stratum ke-i

n_i = besarnya sampel pada stratum ke – i

N = besarnya populasi secara keseluruhan

n = besarnya sampel dari populasi

Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu, kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan kuesioner yang disebarakan kepada seluruh responden yang menjadi sampel penelitian. Pengiriman kuesioner dilakukan dengan menggunakan jasa pelayanan pengiriman surat.

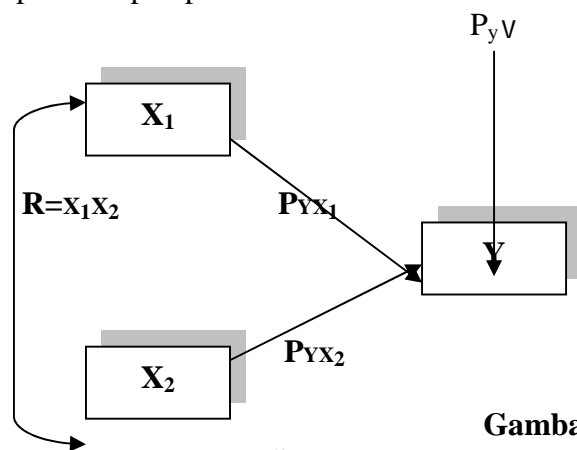
Kuesioner disusun dengan *Skala Likert* sebagai formasi item-item pengukur variabel penelitian berbentuk pernyataan dengan lima pilihan respon/jawaban. Penyusunan item-item pernyataan pada kuesioner dilakukan dengan mengacu pada struktur operasionalisasi variabel penelitian. Pernyataan dalam kuesioner disusun baik secara *favorable* (positif) maupun *unfavorable* (negatif). Data yang terkumpul selanjutnya direkapitulasi dalam bentuk *coding sheet* yang disusun secara *cross sectional*.

Sebelum kuesioner disebarakan ke responden yang dituju, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian instrumen melalui uji validitas (*test of validity*) dan uji reliabilitas (*test of realibility*). Berdasarkan hasil kedua pengujian tersebut menunjukkan bahwa

terdapat beberapa item pertanyaan/ pernyataan yang tidak valid namun memiliki reliabilitas yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai r hitung $>$ r tabel. Dengan menghilangkan item pertanyaan yang tidak valid sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen sudah layak dalam mengukur variabel penelitian, serta telah memiliki keandalan dan konsistensi.

Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis jalur (*path analysis*). Berdasarkan hubungan antar variabel independen dan dependen, maka dapat digambarkan diagram jalur yang menggambarkan paradigma hubungan antar variabel seperti tampak pada Gambar 1. berikut ini :



Gambar.1.
Struktur Pengaruh X_1 , dan X_2 terhadap Y

Keterangan:

- X_1 = Variabel Peran Auditor Internal
- X_2 = Variabel Pengendalian Intern
- Y = Variabel Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
- V = Variabel lain yang mempengaruhi Y
- P_{YX_1} = Koefisien jalur dari variabel X_1 terhadap variabel Y
- P_{YX_2} = Koefisien jalur dari variabel X_2 terhadap variabel Y
- P_{YV} = Koefisien jalur dari variabel lain yang mempengaruhi variabel Y

Pengaruh antar variabel ditentukan melalui koefisien jalur seperti tertulis dalam persamaan struktural berikut ini :

$$Y = P_{YX_1}X_1 + P_{YX_2}X_2 + P_{YV}V_1$$

Uji hipotesis tentang pengaruh dari masing-masing variabel terhadap Y dilakukan dengan menguji hipotesis berikut :

$$H_o = P_{YX_i} = 0;$$

$$H_A = P_{YX_i} \neq 0; \text{ untuk } i = 1, 2 \text{ dan } 3$$

Nilai P_{YX_i} adalah nilai koefisien jalur yang ditaksir atau dihitung berdasarkan data hasil pengamatan. Perhitungan taksiran koefisien jalur P_{YX_i} dilakukan melalui analisis *regresi multiple*. Dalam hal ini penentuan koefisien jalur dilakukan dengan meregresikan variabel Y terhadap X_1, X_2 . Persamaan regresinya adalah :

$$Y = S_0 + S_1X_1 + S_2X_2 + V_1$$

Koefisien-koefisien regresi S_i , $i = 0,1,2,3$ ditaksir melalui metode kuadrat kecil (*ordinary least squares*). Koefisien-koefisien jalur adalah koefisien-koefisien regresi setelah semua data, baik untuk variabel Y maupun variabel X_1 , dan X_2 terlebih dahulu dibakukan (*standardized*). Oleh karena itu maka uji hipotesis untuk koefisien regresi adalah juga berlaku untuk koefisien jalur yang telah tersedia dalam paket program komputer statistik seperti SPSS yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien regresi untuk data yang sudah dibakukan (koefisien jalur).

HASIL PENELITIAN

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Data dalam penelitian ini diperoleh dari responden yaitu para pejabat pada dinas- dinas di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan instrumen kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data. Mengenai tingkat pengembalian kuisioner (*responses rate*) Cooper dan Schindler (2006: 314) mengemukakan bahwa dengan tingkat pengembalian sebesar 30% sudah termasuk baik, dan akan lebih baik lagi bila mencapai 70%. Dengan demikian, tingkat pengembalian kuisioner sebesar 92,17% merupakan tingkat pengembalian yang sangat baik berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Cooper dan Schindler (2006: 314).

Setelah dilakukan pemeriksaan setiap halaman kuesioner, maka kuesioner yang lengkap, pengisiannya jelas dan tidak meragukan digunakan dalam pengolahan data penelitian. Untuk lebih jelas, maka ringkasan kuesioner yang disebarkan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Jumlah Responden	Kuesioner Dikirimkan	Kuesioner Kembali	Tidak Dapat Diolah	Dapat Diolah
281	281	259	8	251
	100%	92,17%	2,85%	89,32%

Sumber : Hasil Kuesioner

Berdasarkan Tabel 2, jumlah kuesioner yang dikirimkan sebanyak 281 eksemplar, dan yang mengembalikan sebanyak 259 kuesioner (*response rate* 92,17%). Selanjutnya, setelah dilakukan seleksi lebih lanjut untuk mengetahui kuesioner mana yang dapat diolah dan mana yang tidak dapat diolah, hasilnya menunjukkan terdapat 8 kuesioner (2,85%) yang tidak dapat diolah (tidak lengkap dan *redudance*), dengan demikian kuesioner yang dapat diolah sebanyak 251 (89,32%), yang dianggap dapat memenuhi ketentuan baik dari model analisis yang digunakan maupun ukuran sampel yang direncanakan.

Hasil Pengolahan Data

Untuk
menjawab
permasalahan
penelitian

Tabel 4
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.608 ^a	.369	.364	13.56119

a. Predictors: (Constant), Pengendalian, Auditor

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26697.364	2	13348.682	72.584	.000 ^a
	Residual	45608.668	248	183.906		
	Total	72306.032	250			

a. Predictors: (Constant), Pengendalian, Auditor

b. Dependent Variable: Tatakelola

berkaitan dengan peran auditor internal dan pengendalian intern dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam penelitian ini digunakan *analisis jalur*. Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut :

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa secara keseluruhan model yang diuji menunjukkan kecocokan dengan data empirik. Hal ini dapat diartikan bahwa model pengaruh peran auditor internal dan pengendalian intern terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik secara simultan adalah signifikan.

Selanjutnya untuk melihat pengaruh peran auditor internal dan pengendalian intern terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diketahui dari perhitungan dalam model summary, khususnya angka R_{square} berikut ini : Berdasarkan Tabel 4 diketahui besarnya angka R_{square} (r^2) adalah 0,369. Angka tersebut dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh peran auditor internal dan pengendalian intern terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan cara menghitung Koefisien Determinasi (KD) dengan rumus sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,369 \times 100\%$$

$$KD = 36,9 \%$$

Koefisien Determinasi sebesar 36,9% artinya, peran auditor internal dan pengendalian intern mampu menerangkan variabilitas dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik sebesar 36,9 % dan sisanya sebesar 63,1% disebabkan oleh faktor lain di luar model.

Selanjutnya untuk menguji hipotesis secara parsial, dilakukan melalui hipotesis statistik sebagai berikut :

- 1) H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan peran auditor internal terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik
 H_1 : Ada pengaruh yang signifikan peran auditor internal terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik
- 2) H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan pengendalian intern terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik
 H_1 : Ada pengaruh yang signifikan pengendalian intern terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel peran auditor internal dan pengendalian intern terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik secara parsial, digunakan uji-t dan untuk melihat besarnya pengaruh digunakan angka Beta atau *Standardized Coefficients* berikut ini :

Tabel 5
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	40.449	6.741		6.001	.000
Auditor	.237	.114	.143	2.073	.039
Pengendalian	.640	.088	.500	7.236	.000

a. Dependent Variable: Tatakelola

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa nilai t_{hitung} koefisien jalur dari variabel peran auditor internal terhadap pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik diperoleh sebesar 2,073 lebih besar dari t_{kritis} sebesar 1,9695 maka disimpulkan bahwa peran auditor internal berpengaruh terhadap pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik. Besarnya pengaruh peran auditor internal terhadap pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik sebesar 0,143 atau 14,3 % dianggap signifikan. Hal ini tercermin dalam angka signifikansi sebesar 0,039 lebih kecil dari 0,05.

Selanjutnya nilai t_{hitung} koefisien jalur dari variabel pengendalian intern terhadap pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik diperoleh sebesar 7,236 lebih besar dari t_{kritis} sebesar 1,9695 maka disimpulkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik. Besarnya pengaruh pengendalian intern terhadap pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik sebesar 0,50 atau 50 % dianggap signifikan. Hal ini tercermin dalam angka signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Korelasi antara peran auditor internal dengan pengendalian intern dapat diketahui dari hasil perhitungan pada Tabel 6 berikut ini :

Tabel 6
Correlations

		Auditor	Pengendalian
Auditor	Pearson Correlation	1	.684**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	251	251
Pengendalian	Pearson Correlation	.684**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	251	251

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh angka korelasi antara peran auditor internal dengan pengendalian intern sebesar 0,684. Untuk menafsir angka tersebut, digunakan kriteria sebagai berikut :

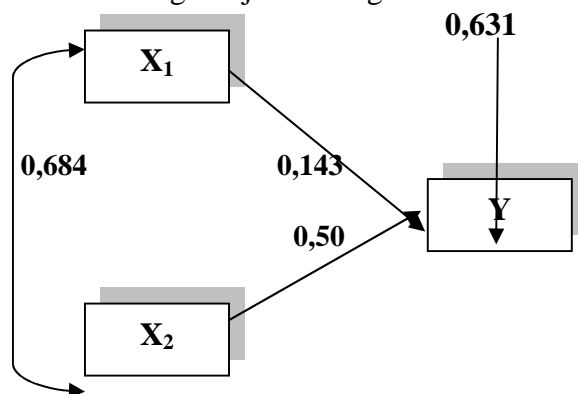
Tabel 7
Kriteria Besarnya Keeratan Hubungan

Nilai Korelasi	Keterangan
< 0,20	Keeratan hubungan sangat rendah atau pengaruh sangat lemah dan hampir bisa diabaikan
0,20 – 0,40	Keeratan hubungan rendah atau pengaruh lemah
0,40 – 0,60	Keeratan hubungan atau pengaruh sedang
0,60 – 0,80	Keeratan hubungan tinggi atau pengaruh kuat
0,80 – 1,00	Keeratan hubungan tinggi atau pengaruh sangat kuat

Sumber : Guilford, (1956 : 145)

Korelasi sebesar 0,684 mempunyai maksud hubungan antara variabel peran auditor internal dengan pengendalian intern kuat dan searah (karena hasilnya positif). Artinya jika peran auditor internal kuat maka pengendalian intern juga kuat. Korelasi variabel peran auditor internal dengan pengendalian intern bersifat signifikan karena angka signifikansi sebesar $0,000 < 0,005$.

Berdasarkan model struktural yang dihipotesiskan diperoleh diperoleh estimasi model dan diagram jalur sebagai berikut :



Gambar 2

Hubungan Struktural Pengaruh Peran Auditor Internal (X_1) dan Pengendalian Intern (X_2) terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Y)

Keterangan:

X_1 = Peran Auditor Internal

X_2 = Pengendalian Intern

Y = Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

v = Variabel lain yang mempengaruhi Y

Hasil yang diperoleh untuk model struktural adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,143X_1 + 0,50 X_2 + 0,631$$

Hasil multiple Regresi di atas, dapat di jelaskan sebagai berikut :

- 1) Setiap kenaikan X_1 (peran auditor internal) satu satuan menyebabkan Y (Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik) naik sebesar 14,3% atau 14,3 satuan.
- 2) Setiap kenaikan X_2 (Pengendalian intern) satu satuan menyebabkan Y (Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik) naik sebesar 50% atau 50 satuan.

Pengaruh Peran Auditor Internal (X_1) terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Y)

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa pengaruh langsung auditor internal (X_1) terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Y) ($\gamma_{y1} = 0.14 \times 0.14$) sebesar 0.02 atau 2%, pengaruh tidak langsung peran auditor internal (X_1) melalui pengendalian intern (X_2) terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Y) ($\gamma_{yx1} \cdot r_{x1x2} \cdot \gamma_{yx2} = 0.50 \times 0.68 \times 0.14$) sebesar 0.05 atau 5%. Sehingga total pengaruh peran auditor internal (X_1) terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Y) sebesar 0.07 atau 7%.

Badan Pengawasan daerah selaku auditor internal pemerintah melakukan pengawasan dengan tujuan melakukan penilaian atas kinerja Pemerintah Daerah. Kebutuhan adanya Bawasda sebagai auditor internal dalam suatu pemerintah daerah karena adanya rentang kendali yang semakin luas yang dihadapi oleh pimpinan pemerintah daerah sebagai akibat semakin banyaknya jumlah dinas/badan/satker/bagian yang dibentuk pada struktur organisasi Pemda. Auditor internal di lingkungan pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Badan pengawas daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pertanggungjawaban pekerjaannya. Hal tersebut sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004), bahwa audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zeleke Belay (2007), yang menyatakan bahwa fungsi Audit Internal sangat besar dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan sistem *good governance* dalam organisasi, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan, sehingga terjadi peningkatan perhatian terhadap manajemen keuangan dan penilaian terhadap kinerja sektor pemerintah berdasarkan struktur pemerintahan, mobilisasi sumber daya dan kompetensi sumber.

Pengaruh Pengendalian Intern (X_2) terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Y)

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa pengaruh langsung pengendalian intern (X_2) terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Y) ($r_{yx2}^2 = 0.50 \times 0.50$) sebesar 0.42 atau 24%, pengaruh tidak langsung Pengendalian Intern (X_2) melalui peran auditor internal (X_1) terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Y) ($r_{yx2} \cdot r_{x2x1} \cdot r_{yx1} = 0.50 \times 0.68 \times 0.14$) sebesar 0.05 atau 5%. Sehingga total pengaruh Pengendalian Intern (X_2) terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Y) sebesar 0.29 atau 29%.

Pengendalian intern merupakan bagian dari praktik tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), juga praktik manajemen, di mana didalamnya mencakup pengawasan yang memadai, etika bisnis, independensi, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan perusahaan, serta mekanisme untuk memastikan adanya tindak lanjut yang seksama jika terjadi pelanggaran dalam perusahaan, seperti dikemukakan oleh Konrath (2002:205), Mas Ahmad Daniri (2005). AICPA Profesional Standards, menyebutkan bahwa suatu proses yang dijalankan oleh direksi, manajemen, dan personal lainnya didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian golongan tujuan berikut ini : (a) Pengendalian operasi - berkaitan dengan penggunaan secara efektif dan efisien sumber daya perusahaan; (b) Pengendalian Pelaporan Keuangan - berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang andal; dan (c) Pengendalian Ketaatan - berkaitan dengan kepatuhan perusahaan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Fadillah (2011), dan Pratolo (2007). Pengendalian internal dapat berpengaruh terhadap *good governance*, hal ini disebabkan karena beberapa komponen pengendalian internal, antara lain: lingkungan pengendalian yang kondusif, penilaian risiko yang relevan, informasi dan komunikasi yang memadai, efektivitas pengawasan, serta aktivitas pengendalian yang handal dapat dilaksanakan dengan baik disetiap organisasi di atas sehingga mampu memperkecil segala risiko yang mungkin terjadi serta mendorong peningkatan pelaksanaan *good governance* di dalamnya.

Pengaruh Peran Auditor Internal (X_1) dan Pengendalian Intern (X_2) secara bersama-sama terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Y)

Total pengaruh yang disebabkan oleh peran auditor internal (X_1) dan pengendalian intern (X_2) secara bersama-sama terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Y) (Pengaruh Total $X_1 +$ Pengaruh Total $X_2 = 0.07 + 0.3$) adalah sebesar 0.37 atau 37%. Artinya, auditor internal dan pengendalian intern mampu menerangkan variabilitas dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik sebesar 37% dan sisanya sebesar 63% disebabkan oleh faktor lain di luar model.

Pelaksana audit internal adalah auditor yang dipekerjakan oleh suatu entitas untuk melaksanakan audit dalam suatu organisasi sehingga ia berkepentingan dengan penentuan apakah kebijakan dan prosedur telah diikuti atau tidak. Tugas utama auditor intern adalah melaksanakan audit ketaatan dan audit operasional. Hasil kerja audit intern dilaporkan pada direksi perusahaan sebagai pengguna hasil kerja audit internal. Dengan demikian audit internal mempengaruhi manajer organisasi, pemilik dan auditor independen. Auditor internal memeriksa dan mengevaluasi pengendalian intern serta entitas secara periodik dan membuat rekomendasi untuk perbaikan (Boyton et al 2001 : 377).

Keberadaan fungsi audit internal yang efektif dapat menciptakan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dalam perusahaan telah digunakan secara ekonomis dan efektif, dan pengendalian yang ada dalam perusahaan dapat memberikan kepastian lebih tinggi bahwa informasi yang dihasilkan terpercaya. Audit internal juga dapat menjadi barometer standar perilaku yang berlaku di perusahaan melalui aktivitas pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan, yang mendorong terciptanya iklim kerja yang efisien. Seiring dengan perbaikan dalam proses internal tersebut, keyakinan investor (termasuk kreditur) terhadap proses pengelolaan perusahaan juga akan meningkat (Mas Achmad Daniri :2005). Sawyer (2003 ; 8), Whittington (2001 ; 776), Boyton (2001 ; 980), IIA (1997 ; 3) menyatakan , pengendalian intern dan audit merupakan dasar bagi terwujudnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif yang signifikan peran auditor internal terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Terdapat pengaruh positif yang signifikan pengendalian intern terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terdapat pengaruh positif yang signifikan peran auditor internal dan pengendalian intern secara bersama-sama terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bagi akademisi dan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini dapat membantu para akademisi sebagai dasar untuk penelitian masa depan dengan memperluas dan mengkaji lebih mendalam variabel lain. Bagi pemerintah daerah memberikan masukan/ informasi dalam menjalankan otonomi daerah untuk lebih menggali dan mengelola potensinya secara mandiri serta melakukan perubahan manajemen pemerintahan, terutama perubahan budaya kerja dari dilayani menjadi melayani (*customer – driven government*), sehingga tata kelola pemerintahan berorientasi pada efisiensi dan efektivitas kegiatan yang didukung oleh transparansi dan akuntabilitas .

Keterbatasan

Bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk mendalami bidang akuntansi sektor publik, khususnya penelitian dalam bidang pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada instansi pemerintah yang kini tengah mengalami banyak perubahan dalam pengelolaannya. Hal ini terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah yang mendorong pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya harus mampu menggali potensi serta melaksanakan pembangunannya secara mandiri. Oleh karena itu dalam penelitian berikutnya perlu diperluas dengan memasukkan dan mengkaji lebih dalam variabel lain seperti: komitmen pimpinan puncak, integritas dan objektivitas, penegakan peraturan, dan budaya organisasi.

Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Pengawasan Daerah selaku auditor internal pemerintah, perlu penegakan aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga setiap pelaksana pengawasan memiliki integritas dan objektivitas yang tinggi dan berdampak pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas, serta didukung oleh transparansi dan akuntabilitas.
2. Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk menggali dan mengelola potensinya secara mandiri serta melakukan perubahan manajemen pemerintahan, oleh karena itu pemerintah dituntut untuk menghindari birokrasi yang berbelit, peraturan yang terlalu banyak, dan mengutamakan pelayanan pelanggan, serta perubahan budaya kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaqi, M. 2004. Pengendalian Intern dan Pemberantasan Korupsi. *Artikel Warta Pengawasan*. Jakarta : BPKP.
- Bastian, Indra. 2007, *Audit Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Belay, Zeleke. 2007. *A study of effective Implementation of Internal Audit Functional to Promote Good Governance in the Public Sector*.
- Boyton, William C, Kell, Walter G. 2001. *Modern Auditing*, Sixth Edition, John Wiley & Sons, Inc, New York
- COSO. 1994. *Internal Control Integrated Framework*, New York : AIGPA's Publication Division
- Daniri, Mas Ahmad. 2005. *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta Pusat: Ray Indonesia.
- Fadillah, Sri. 2011. Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern dan Total Quality Management Terhadap Penerapan *Good Governance*. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Aceh
- Guilford, J.P. 1956. *Psychometric Method*. New York: Mc-Graw - Hill Book Company Inc.
- Gusnardi. 2008. Pengaruh Peran Komite Audit, Internal Control dan Internal Audit dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pencegahan Fraud (Studi pada BUMN terbuka di Indonesia). *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran. Bandung.
- Goodwin, Jenny -Stewart. Pamela Kent. 2006. The use of internal audit by Australian Companies. *Managerial Auditing Journal*. Bradford. vol. 21. Iss. ½ ; pg 81
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesi Akuntansi Publik*. Yogyakarta. Bagian Penerbitan STIE YPKN.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Konrath, Laweey F. 2002. *Auditing Concepts and Applications, A Risk-Analysis Approach*, 5 Edition, West Publishing Company.
- Mohamad, Ismail dkk. 2004. "Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". (Online) dalam <http://www.lan.go.id> diakses tanggal 1 Juni 2013.

- Nasution, Mulia P., 2004 Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah, *Jurnal Forum Inovasi*, Desember-Pebruari 2003, Jakarta, h.69-70
- Nazir. 1999. *Metode Penelitian*, Edisi Keempat, Pustaka Utama, Jakarta.
- Pratolo, Suryo. 2007. *Good Corporate Governance Dan Kinerja BUMN di Indonesia: Aspek Audit Manajemen Dan Pengendalian Intern Sebagai Variabel Eksogen Serta Tinjauannya Pada Jenis Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi X. Universitas Hasanudin Makasar*
- Rosjidi. 2001. *Akuntansi Sektor Puhlik Pemerintah*, Surabaya, Aksara Satu Republik . Indonesia. 2001.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- _____. 2004. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
- _____. 2004. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (revisi UU No. 22 tahun 1999).
- _____.2006. Undang-Undang No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan .
- _____.2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- _____. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Sari, Diana. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Proceeding, Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis Yang Profesional. Bandung, 27 Maret 2012, ISSN-2252-3936*
- Syofyan, Efrizal. 2006. *Pengaruh Peran Komite Audit. Direksi dan Auditor Internal terhadap Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporote Governance. Survei pada Bank dan Perusahaan Asuransi tercatat di PT.BEJ. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran. Bandung.*
- Sawyer B , Dittenhofer A. Mortimer .2003. *Internal Auditing. 5 th Edition, The Institute of Internal Auditors, Florida.*
- Sekaran, Uma, and Bougie, Roger. 2010. *Reseach Method for Business : A skill Building Approach*. John Wiley & Sons Ltd. UK
- The Institute of Internal Auditors. 1997. Statement on Internal Auditing Standard No. 16. *Journal The Instatute of Internal Auditors, Vol LIV: IV.*
- Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.2000. “Manajemen Pemerintahan Baru “, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Tandjung, Yuhendra. 2010. Daftar Koruptor dan Diduga Korupsi di Sumatera Utara, *Harian Orbit Sumut*, 31 Mei 2010.
- Taufik, Taufeni. 2010. Pengaruh Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penegakkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik (Sensus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau). *Pekbis Jurnal*, Vol.2, No.1, Maret 2010: 244-253
- Umar, Husein. 2002, *Metode Riset Bisnis, PT. Gramedia Pustaka Utama*, Jakarta.
- Whittington O. Ray & Pany Kurt. 2001. *Principles of Auditing and Other Assurance Services*, Thirteenth Edition, McGraw-Hill Companies Inc.